



Volume 1, Issue 2, November 2021, ISSN: 2776-7434 (Online), doi: 10.21274

**Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism,
Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy**

Faculty of Islamic Economic and Business

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia

Website: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/index>

KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF

Muhammad Alhada Fuadilah Habib^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Corresponding Author Email: habibhada@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat (social empowerment) sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan (development) yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia (di masa orde baru) dan juga di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep “pembangunan” yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini, begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle down effect (efek rambatan) yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centered (berpusat pada manusia), participatory (partisipatif), empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan). Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Paper ini membahas secara teoritis konsep pemberdayaan masyarakat, latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat, teori-teori pemberdayaan masyarakat (teori ABCD (asset based community development) dan teori stakeholders), konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat; Ekonomi Kreatif; BUMDesa; Peningkatan Ekonomi; Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Abstract: *The emergence of the concept of community empowerment (social empowerment) as a result of the failure of the concept of development (development) that had been applied before in Indonesia (in the New Order era) and was applied in other Asian developing countries. The concept of "development" brought about by this neoclassical economic paradigm, so deified industrialization and the trickle-down effect mechanism, which has proven to be incapable of equitably prospering society. Conceptually, community empowerment is defined as a concept of economic development that encapsulates social values. This concept reflects the new paradigm of development, which is people-centered (human-centered), participatory (participatory), empowering (empowering), and sustainable (sustainable). The creative economy is one of the important concepts in community economic empowerment because quite a lot of community empowerment programs in the creative economy have succeeded in improving the community's economy. This paper discusses theoretically the concept of community empowerment, the background to the emergence of the concept of community empowerment, theories of community empowerment (ABCD theory (asset-based community development) and stakeholders theory), the concept of community economic improvement, the concept of the creative economy, typology of society in community empowerment, and the flow of community empowerment through the establishment of BUM Desa.*

Keywords: *Community Empowerment; Creative Economy; BUMDesa; Economic Improvement; Community Economic Empowerment.*

PENDAHULUAN

Istilah “pemberdayaan masyarakat” cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi di telinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Berita mengenai program pemberdayaan masyarakat cukup sering kita lihat/dengar mulai dari koran, radio, televisi, dan media internet. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal, umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konsep “pemberdayaan” berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari, seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, dan kesehatan (Hamid, 2018).

Secara konseptual pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Sumodiningrat, 2009). Dalam pendapat lain, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable* (berkelanjutan) (Alfitri, 2011).

Secara umum, pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, sehingga setelah diberdayakan mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Selain mampu memenuhi kebutuhan dasar, masyarakat juga diharapkan akan mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang/jasa yang dibutuhkan dengan kualitas yang bagus. Dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2010).

Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini bisa diakibatkan karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Harapannya setelah diberdayakan, masyarakat bisa lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang mandiri. Kemandirian yang dimaksud di sini tidak sekedar dilihat dari aspek ekonomi saja, namun juga secara sosial, budaya, dan hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018).

Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor industri rumahan (UMKM) baik yang dilakukan oleh individu maupun BUM Desa cukup banyak yang telah berhasil di bidang ekonomi kreatif (Hasan, 2018). Dalam pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan ekonomi kreatif, perlu menggali dan mengasah potensi *creativity*, *innovation*, *invention* dalam diri masyarakat. Secara umum ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi

masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam paradigma ekonomi kreatif, pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang ada dalam diri masyarakat (Purnomo, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu pilihan terbaik dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini secara khusus membahas mengenai studi/penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat. Studi terdahulu ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi dalam upaya menyusun dan menjelaskan kajian teoritis pemberdayaan masyarakat. Berbagai informasi dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat, dapat diperoleh dengan cara belajar dari kesalahan dan/atau keberhasilan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya melalui studi-studi terdahulu.

Studi *pertama* dilakukan oleh Muhammad Alhada Fuadilah Habib dan Mahyuddin dengan judul Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunungpring Kabupaten Magelang. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUM Desa KSM Berkah. Upaya pengembangan ini dilakukan oleh pemerintah yaitu Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan membantu membangun infrastruktur Teknologi TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) untuk mengatasi permasalahan sampah di desa wisata tersebut. Hasil penelitian ini secara ringkas menjelaskan bahwa BUM Desa belum sepenuhnya berhasil mengelola desa wisata beserta infrastruktur yang telah diberikan pemerintah. Faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan BUM Desa ini adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengelola (SDM) yang kurang sesuai dengan yang seharusnya (Habib & Mahyuddin, 2021). Dengan demikian dapat diambil pelajaran bahwa kuantitas dan kualitas SDM pengelola BUM Desa sangat penting diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tenaga pengelola / pengurus BUM Desa harus mencukupi secara kuantitas, dan memiliki kualifikasi keahlian yang sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan, serta memiliki komitmen kerja yang bagus.

Studi *kedua*, dilakukan oleh Fitria dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA). Studi ini secara ringkas mendeskripsikan mengenai bentuk dan metode pemberdayaan masyarakat beserta hasil dan implikasinya bagi masyarakat yang diberdayakan. Secara ringkas hasil studi ini menjelaskan bahwa proses

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan kepada BUM Desa Maju Makmur ini dilakukan dengan pemberian modal, bantuan pemasaran, kemitraan usaha dan penguatan kelembagaan. Adapun implikasi dari pemberdayaan ekonomi melalui BUM Desa ini adalah kemudahan menambah modal usaha, menambah produksi masyarakat, kemudahan mendapatkan sarana pertanian, peningkatan pendapatan, peningkatan kehidupan sosial ekonomi, dan menambah wawasan para pegawai/pengelola BUM Desa. Namun demikian ditemukan pula ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja dikarenakan tidak adanya pendampingan (Fitria, 2020). Berdasarkan studi ini dapat diambil pelajaran mengenai pentingnya pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. BUM Desa perlu diberikan pendampingan dalam menjalankan usahanya sampai benar-benar mampu berdiri secara mandiri.

Studi *ketiga*, dilakukan oleh Syndi Dwi Purnamasari dan Muhammad Farid Ma'ruf dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) (Studi BUM DESA Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). Studi ini secara sederhana mendeskripsikan upaya pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Mawar yang dilakukan melalui empat prinsip pemberdayaan yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Mawar secara umum berjalan cukup baik. Melalui prinsip kesetaraan, masyarakat diberikan hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender atau pun golongan. Melalui prinsip partisipasi, BUM Desa melakukan pendampingan dan mengadakan sosialisasi/pelatihan dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten dari dinas terkait. Melalui prinsip keswadayaan/kemandirian, BUM Desa memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan usulan mengenai program yang akan diadakan. Melalui prinsip berkelanjutan, target bertambahnya jumlah anggota dan bertambahnya sektor usaha diharapkan dapat menjadikan BUM Desa ini bisa lebih maju dan lebih berkembang kedepannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan prinsip partisipasi, sosialisasi/pelatihan yang dilakukan seringkali tidak diimbangi dengan adanya praktik, sehingga masyarakat menjadi kurang beminat untuk mengikuti program dan masyarakat susah memahami dan mempraktekkan secara langsung ilmu yang telah didapat dari kegiatan sosialisasi/pelatihan (Purnamasari & Ma'ruf, 2020). Berdasarkan studi ini dapat diambil pelajaran betapa pentingnya praktik langsung dalam kegiatan sosialisasi/pelatihan kepada masyarakat. Dengan demikian, kedepannya ketika melakukan kegiatan sosialisasi/pelatihan dalam upaya pemberdayaan

masyarakat, perlu diupayakan untuk melakukan praktik secara langsung agar masyarakat menjadi mudah dalam memahami materi yang disampaikan.

Studi *keempat*, dilakukan oleh Venita Sofiani, Luthpi Saepuloh, dan Elan Eriswanto dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai upaya pengembangan BUM Desa melalui sosialisasi dan pelatihan penyusunan administrasi laporan keuangan desa dan pengembangan unit usaha desa. Hasil studi ini secara garis besar menemukan bahwa aparatur desa kurang menyambut baik upaya perbaikan pembuatan laporan administrasi keuangan desa. Namun demikian, aparatur desa sangat tertarik dan menyambut baik upaya pengembangan BUM Desa dalam hal pengembangan produk potensi desa (Sofiani, Saepuloh, & Eriswanto, 2017). Berdasarkan studi ini dapat diketahui bahwa upaya pengembangan BUM Desa khususnya perbaikan administrasi laporan keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi fasilitator/pelaku pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan realitas ini, pihak fasilitator/pelaku ekonomi masyarakat perlu mengetahui sedini mungkin kemungkinan permasalahan ini, sehingga dapat segera mencari solusi terbaik untuk mengatasinya. Solusi ini perlu diupayakan agar proses pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terkendala permasalahan ketertiban administrasi laporan keuangan. Mengingat laporan keuangan merupakan aspek penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUM Desa terhadap modal yang telah diberikan, serta sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan/penyelewengan modal/keuntungan yang diperoleh BUM Desa.

Studi *kelima*, dilakukan oleh Devi Nur Puspitasari, Hardi Warsono, dan Ida Hayu DM dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Studi ini secara ringkas menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri sehingga memperoleh banyak penghargaan dan menjadi BUM Desa percontohan di Indonesia. Hasil studi ini menjelaskan bahwa kesuksesan BUM Desa Tirta Mandiri tidak didapatkan secara instan namun melalui serangkaian proses pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok. Faktor utama yang menjadi penyebab kesuksesan BUM Desa ini adalah keterlibatan aktif pemerintah desa yang tidak lelah melakukan studi literasi dengan menggandeng berbagai akademisi dan konsultan agar Desa Ponggok bangkit menjadi desa yang maju dan terentaskan dari garis kemiskinan. Selain itu, berbagai inovasi usaha juga terus dikembangkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri supaya mampu bersaing dan mengikuti perkembangan jaman. Selain itu, untuk kemajuan BUM Desa, pemerintah desa turut menggandeng berbagai lembaga ekonomi

tingkat desa seperti Pokdarwis Wanua Tirta dan UKM Nila Murni (Puspitasari, Warsono, & DM, 2020). Berdasarkan studi ini, dapat diambil pelajaran berupa pentingnya peran aktif pemerintahan desa dalam upaya memajukan BUM Desa, sehingga pihak fasilitator/pelaku pemberdayaan masyarakat perlu berupaya untuk mendorong peran aktif pemerintah desa dalam upaya memajukan BUM Desa di masing-masing wilayah. Selain itu, dapat diketahui pula pentingnya peran akademisi dan konsultan serta keterlibatan berbagai lembaga ekonomi tingkat desa dalam upaya memajukan BUM Desa. Berbagai inovasi produk juga perlu terus diupayakan oleh BUM Desa agar produk-produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat secara luas sehingga produk yang dihasilkan BUM Desa dapat menghasilkan banyak profit.

Studi *keenam*, dilakukan oleh Zul Asfi Arroyhan Daulay dengan judul Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode *Triple Helix* (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). Secara ringkas hasil studi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat pada UMKM dalam bidang ekonomi kreatif terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan peluang kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Studi ini juga menemukan bahwa bidang usaha ekonomi kreatif paling sukses dan diminati oleh masyarakat adalah pertama bidang kuliner, kedua bidang fashion, dan ketiga bidang kerajinan (Daulay, 2018). Berdasarkan studi ini dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup bagus khususnya untuk usaha kuliner, fashion, dan kerajinan, sehingga temuan ini bisa menjadi salah satu alternatif bentuk usaha pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan.

Berdasarkan studi-studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas, pihak fasilitator/pelaku pemberdayaan masyarakat dapat menjadikannya sebagai referensi untuk program pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pembentukan BUM Desa. Berbagai kesalahan hasil evaluasi dapat diantisipasi agar tidak terjadi lagi, serta berbagai faktor/aspek pendukung keberhasilan dapat diambil untuk diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat dengan berbagai penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing masyarakat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Studi Pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber/literatur yang dibutuhkan dalam penelitian (Usrah, Habib, & Fakhurrizi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis studi-studi atau program pemberdayaan masyarakat. Beberapa teori yang dibahas dalam bagian ini diantaranya adalah teori ABCD (*asset based community development*), teori *stakeholders*, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa.

Latar Belakang Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan (*development*) yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia (di masa orde baru) dan diterapkan negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep “pembangunan” yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini, begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme *trickle down effect* (efek rambatan) yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Lahirnya konsep pemberdayaan masyarakat ini, sebagai lawan dari konsep pembangunan yang terbukti telah gagal diterapkan, dalam arti efek yang diharapkan ini tidak berjalan sebagai mana mestinya (Nugroho, 2014).



Gambar 1. Konsep *Trickle Down Effect*

(Aghion & Bolton, 1997)

Gambar di atas menunjukkan bahwa espektasi *trickle down effect* (efek rambatan) ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Secara semiotik, gambar di atas menjelaskan bahwa mereka yang berada di posisi atas tidak pernah puas dengan sumber daya yang diberikan, dalam arti sumber daya yang diberikan selalu habis di atas, baik melalui mekanisme korupsi maupun mekanisme pemanfaatan yang dianggap sah. Dengan demikian

masyarakat yang dibawahnya tidak akan kebagian sumber daya yang telah dikucurkan dari atas (Aghion & Bolton, 1997).

Implikasi nyata kegagalan konsep pembangunan “terpusat” ini adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Jakarta, merupakan wilayah yang paling diuntungkan dan paling maju, padahal wilayah pedesaan biasanya memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan kota besar. Di era Orde Baru, fokus pembangunan berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, sehingga wilayah di luar Jawa dan Bali tingkat pembangunannya masih kurang baik. Kondisi seperti ini menyebabkan daerah merasa tersisihkan (tidak dianggap) akibat program-program kebijakan yang bersifat *top-down* (dari pusat ke daerah). Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah terasa hanya sebagai penonton dan pelayan/pembantu di wilayahnya sendiri. Kondisi seperti ini merupakan implikasi logis dari kebijakan-kebijakan yang hanya dibuat oleh pemerintah pusat sehingga daerah hanya bisa pasrah menunggu dan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Contoh konkret adalah hingga tahun 2014 ada sekitar 62 juta penduduk di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik, sementara di kota-kota besar persediaan listrik sudah sangat memadai. Contoh lain pembangunan di daerah Papua yang masih sangat tertinggal sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis.

Adapun implikasi negatif dari penerapan ekonomi neoklasik diantaranya: *pertama*, mempersempit lapangan pekerjaan, hal ini dikarenakan dalam ekonomi neoklasik lebih menekankan industrialisasi sehingga meminimalisir tenaga kerja dengan dalih efisiensi, dengan demikian paradigma ini sebenarnya cocok untuk efisiensi namun tidak cocok untuk pemerataan ekonomi masyarakat. *Kedua*, tergadainya kedaulatan ekonomi bangsa karena dalam ekonomi neoklasik semua sumber daya sebisa mungkin dikomersialisasikan (dijual) untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, termasuk sumber daya alam yang dimiliki. *Ketiga*, tidak terjaminnya kesejahteraan buruh. Kondisi ini terjadi karena negara yang menerapkan ekonomi neoklasik sengaja menekan upah pekerja untuk menarik investor asing (Nugroho, 2014). Adanya kondisi-kondisi negatif yang telah dijelaskan di atas sebagai implikasi dari penerapan ekonomi neoklasik yang begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme *trickle down effect*, sehingga memunculkan konsep pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik.

Teori ABCD (Asset Based Community Development)

Salah satu model pendekatan yang dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). ABCD

merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat (Maulana, 2019). Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa, misalnya BUM Desa, Ibu-Ibu PKK, Kelompok Tani, atau kelompok remaja, merupakan aset desa yang sangat berharga. Berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat keterampilan atau potensinya kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis.

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD ini, merupakan sebuah alternatif pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan aset lokal sebagai penekanannya. Adapun yang dimaksud “aset” dalam konteks ini adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat sendiri (Fitriawan, 2020). Masyarakat dapat menggunakan potensi atau kekayaan yang dimiliki sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, misalnya kecerdasan, kreativitas, kepedulian, gotong royong, dan solidaritas. Kemudian bisa juga berupa ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti bentang alam yang indah, ladang yang subur, pantai yang menghasilkan banyak ikan, atau sungai yang menghasilkan pasir.

Secara sederhana, pendekatan ABCD dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan dilakukan (Fithriyana, 2020). Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, akan mampu memberikan kesempatan kepada mitra (masyarakat yang diberdayakan) untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimilikinya sendiri, sehingga akan menciptakan suatu kemandirian bagi masyarakat mitra (Alhamuddin, Aziz, Inten, & Mulyani, 2020).

Dalam pendekatan ABCD, masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan tidak disebut sebagai kelompok yang lemah atau tidak memiliki potensi apa-apa, namun masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan, termasuk permasalahan peningkatan taraf hidup (sosi-ekonomi). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat yang belum berdaya disebabkan karena ketiadaan akses untuk memaksimalkan potensi yang telah dimiliki, atau karena masih terbatasnya sistem sumber daya yang mampu memfasilitasi masyarakat dalam rangka memanfaatkan potensi yang telah dimiliki.

Dalam pemberdayaan, diperlukan adanya fasilitator yang berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Disamping itu, fasilitator juga berperan dalam menghubungkan potensi yang ada dalam masyarakat dengan sistem atau model pemberdayaan yang tepat. Dalam hal ini, fasilitator juga bisa membantu untuk menghubungkan ke berbagai lembaga/badan/kelompok lain yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat mitra dengan jaringan yang lebih luas (Rahman, 2018).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan yaitu *Problem Based Approach*, *Need Based Approach*, *Right Based Approach*, dan *Asset Based Approach* (Widjajanti, 2011). *Problem Based Approach* merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat setempat akan melakukan perubahan atau berusaha untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapinya. Dengan demikian, aspek “kesadaran akan masalah” ini, merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi.

Aspek *Need Based Approach* merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Kebutuhan dasar merupakan hal yang sangat penting dan harus terpenuhi terlebih dahulu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan kebutuhan hidup, kenyamanan dan kesejahteraan. Kebutuhan anggota masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan, merupakan hal yang harus ada pada tiap-tiap anggota masyarakat sebagai wujud tercukupinya kebutuhan dasar. Aspek ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum masyarakat diberdayakan untuk melakukan sebuah perubahan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan sangat susah untuk diberikan inovasi-inovasi pemberdayaan sebelum terpenuhinya kebutuhan dasar terlebih dahulu.

Aspek *Right Based Approach*, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan (materi) untuk pemberdayaan masyarakat. Prinsip aspek ini adalah menggunakan bantuan modal (dana awal) untuk memulai melakukan sebuah usaha perubahan menuju kemandirian. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal, butuh dana operasional agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai rencana.

Terkadang dana awal ini juga sangat diperlukan untuk kondisi-kondisi yang mendesak, seperlu kerusakan sarana dan prasarana maupun kecelakaan yang membutuhkan dana untuk perbaikan.

Aspek *Asset Based Approach*, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Potensi yang dimaksud di sini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Beberapa potensi inilah yang merupakan aset besar dan sangat berharga dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam diri masyarakat, diharapkan dapat memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah bekerja sama dengan solid dan mampu menciptakan inovasi-inovasi produk usaha baru yang mengagumkan.

Selain keempat aspek yang telah disebutkan sebelumnya, ada satu aspek lain yang perlu diperhatikan juga dalam pemberdayaan masyarakat yaitu aspek Sumber Daya Alam (SDA). Kekayaan alam merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat. Aspek SDA ini sebenarnya merupakan aspek eksternal dalam kaitannya dengan pendekatan ABCD. Hal ini dikarenakan kekayaan alam atau SDA merupakan hal kodratiah (alamiah) yang diberikan oleh Tuhan untuk dilestarikan masyarakat tertentu saja. Adapun beberapa kekayaan alam tersebut seperti kondisi tanah yang subur untuk pertanian, perkebunan, kondisi alam yang rindang, hutan yang subur, lautan atau pantai yang indah dan sebagainya (Suardi, Mallongi, & Baharuddin, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) merupakan sebuah pendekatan yang menjadikan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri sebagai kekuatan dalam pengembangan sebuah masyarakat. Melalui pendekatan ini, secara berkelanjutan dapat membentuk kemandirian, kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan ABCB ini diantaranya adalah, sumber daya manusia, institusi/assosiasi/organisasi, sumber daya alam, finansial/ekonomi, *opportunity*, dan kondisi sosial masyarakat setempat (Riyanti & Raharjo, 2021).

Teori Stakeholders

Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peranan para pemangku kepentingan tersebut, tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.

Secara konseptual, *stakeholders* dapat didefinisikan sebagai orang/kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu (Wahyu, Golar, & Massiri, 2019). Dengan demikian, jika berbicara mengenai *stakeholders theory* berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Hal utama mengenai teori *stakeholders* adalah bahwa *stakeholders* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholders* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdersnya* (Nur & Priantinah, 2012).

Asumsi dasar dari teori *stakeholders* menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antar *stakeholders*, maka akan semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antar *stakeholders* maka akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan ini didasarkan pada nilai kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholders* merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik (Mardikanto, 2014).

Dalam proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat, harus benar-benar dijalankan secara terpadu, antara fasilitator beserta seluruh *stakeholders* (termasuk masyarakat penerima manfaat). Tahapan perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat. Pada tahapan ini akan diketahui masalah-masalah sesungguhnya yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, dan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah. Kemudian, seluruh hasil kesepakatan hendaknya dibuat secara tertulis sehingga akan menjadi acuan dalam bekerja, serta menghindari terjadinya saling

menyalahkan ketika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Prinsip dasar dan paling utama, yang harus selalu diingat dan diimplementasikan oleh para *stakeholders* dalam penyusunan suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat, adalah harus bersifat partisipatif (*bottom up*) (Hamid, 2018).

Keterlibatan *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Kolaborasi merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadaan di mana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tiap-tiap tahap pencapaian tujuan bersama, adapun unsur-unsurnya meliputi *Resources*, *Organization*, dan *Norms* (Salman, 2012). Adapun keterlibatan *stakeholders* dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari tiga tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan (Wrihatnolo, 2007).

Analisis keterlibatan *stakeholders* dalam setiap tahapan pemberdayaan masyarakat selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pada tiap-tiap tahap pemberdayaan. Analisis ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas keterlibatan para *stakeholders*. Selanjutnya hasil dari pemetaan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat tugas pokok dan fungsi masing-masing aktor (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah umumnya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini, tampaknya terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing di era globalisasi, tujuannya agar masyarakat tidak ketinggalan zaman dan memiliki daya saing ditengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Secara konseptual “peningkatan” berasal dari kata “tingkat”, yang berarti “lapis” atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya (Harahap, 2018).

Secara konseptual “ekonomi” merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui perubahan-perubahan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi (Harahap, 2018). Secara asal kata, istilah “ekonomi” itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu “oikonomia”. Kata tersebut merupakan turunan dari dua kata, yaitu “oikos” dan “nomos”. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Jadi arti asli oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa membicarakan ekonomi berarti membicarakan aturan, kaidah, dan cara mengelola suatu rumah tangga manusia. Rumah tangga disini bukanlah dalam arti sempit, melainkan menunjuk pada suatu kelompok sosial, yang dianggap sebagai rumah tangga kelompok sosial ini dapat berwujud perusahaan, desa, kota, bahkan negara (Rosyidi, 2004).

Sementara itu, secara konseptual masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama atau golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang melakukan interaksi dan saling bergaul dalam lingkungan sosial yang berupa satu kesatuan, hidup secara mandiri, bebas dan menghasilkan suatu kebudayaan, nilai, dan norma sosial (Soekanto, 2000). Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa, peningkatan ekonomi masyarakat dalam konteks ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat/kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap (Anharudin, Fernando, Saefudin, Susandi, & Dwiyoatno, 2019). Tahapan pertama adalah *assessment*. Tahap *assessment* merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat serta potensi yang dimiliki. Caranya dengan melakukan pengkajian maupun penilaian terhadap keadaan wilayah atau desa tempat melakukan pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan dengan melakukan observasi (melihat langsung ke lokasi), *indepth interview* (wawancara mendalam) kepada masyarakat calon mitra, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki desa.

Dalam tahap ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Salah satu metode *assessment* yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah PRA (*Participatory Rural Appraisal*). PRA memiliki karakteristik yang selalu terbuka menerima cara-cara atau metode-metode baru yang dianggap cocok, sehingga mudah diterapkan dalam rangka

penggalan potensi masyarakat. Dengan mengetahui potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat selama ini.

Tahap kedua adalah tahap pelatihan. Di tahap kedua ini masyarakat diberikan pelatihan, dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Praktisi dan akademisi yang berkualitas dilibatkan sebagai narasumber pada tahap ini. Kegiatan pelatihan ini mirip seperti kegiatan penyuluhan berupa edukasi mengenai bagaimana cara berwirausaha dan mengelola sektor usaha yang baik, kemudian memberikan beberapa eksperimen dan contoh bagaimana memulai mengelola sektor usaha baru, selanjutnya memberikan tips/strategi yang bisa dilakukan agar produk bisa laku dipasarkan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara membuat inovasi produk, yang bisa diterima oleh masyarakat saat ini. Selain teori, dalam kegiatan ini masyarakat juga diajari praktek langsung bahkan dilakukan pendampingan sampai bisa mandiri dan berdaya.

Tahap ketiga adalah evaluasi dan perbaikan. Setelah program pengabdian masyarakat ini berjalan, selanjutnya perlu dilakukan evaluasi secara bertahap dengan melihat progres dan kesesuaian antara tujuan dengan hasil di lapangan. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai, segera dilakukan pengkajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya dan segera dicarikan solusi untuk perbaikan. Tahap ini cukup penting dilakukan mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program umum dilakukan, sehingga dengan adanya tahap evaluasi ini, kesalahan-kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki.

Tipologi Masyarakat

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik yang sangat beragam. Keberagaman tersebut mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Dari berbagai kondisi tersebut, masing-masing masyarakat memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, baik karakteristik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia. Dengan potensi yang berbeda-beda tersebut, diperlukan pemetaan tipologi wilayah berdasarkan sebaran potensi masing-masing. Tipologi ini penting dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki.

Secara sederhana tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap wilayah (Despica, 2018). Tipologi atau klasifikasi masyarakat ini secara umum meliputi tiga aspek (Despica, 2018). Ketiga aspek tersebut yaitu:

1. *Potensi Dasar*, potensi ini merupakan modal dasar dari masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan pembangunan, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi/letak wilayah.
2. *Tipe Masyarakat*, tipe ini ditentukan berdasarkan pendekatan potensi dominan yang diolah dan dikembangkan serta telah menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti masyarakat pertanian, perkebunan, nelayan, perindustrian, atau pertokoan.
3. *Tingkat Perkembangan Masyarakat*, tingkat perkembangan masyarakat bisa dilihat/diukur berdasarkan Indikator Tingkat Perkembangan Masyarakat. Indikator ini digunakan untuk melihat/mengukur sejauh mana perkembangan masyarakat berdasarkan kurun waktu tertentu. Adapun yang menjadi indikator tingkat perkembangan masyarakat diantaranya adalah:
 1. Perkembangan infrastruktur
 2. Perkembangan fasilitas umum
 3. Perkembangan akses informasi
 4. Perkembangan kualitas sumber daya manusia
 5. Perkembangan pendapatan penduduk.

Indikator pertama yang menjadi acuan perkembangan masyarakat adalah perkembangan infrastruktur. Perkembangan infrastruktur dapat dilihat terutamanya dari akses jalan raya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan realitas bahwa terdapat beberapa wilayah yang memiliki akses jalan raya yang mudah dilalui berbagai macam kendaraan, dan ada pula wilayah yang masih memiliki akses jalan raya yang buruk dan sulit dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Akses jalan raya ini menjadi salah satu indikator penting perkembangan masyarakat mengingat jalan raya merupakan modal utama akses transportasi darat untuk distribusi barang/jasa. Dengan adanya akses jalan yang mudah, maka logistik atau barang-barang penduduk akan mudah didistribusikan, baik keluar maupun kedalam. Sebaliknya akses jalan yang buruk akan membuat logistik atau barang-barang lain sulit untuk masuk maupun keluar dari wilayah tersebut.

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur perkembangan masyarakat adalah perkembangan fasilitas umum. Sebagai pendukung pertumbuhan masyarakat, perlu adanya fasilitas umum yang memadai sebagai penunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat atau penduduk setempat agar semakin maju. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan tersebut diantaranya adalah: pasar yang memadai, sekolahan, dan puskesmas.

Indikator ketiga untuk melihat perkembangan masyarakat adalah akses informasi. Akses informasi yang baik, dapat memajukan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya akses informasi yang baik, penduduk desa/kelurahan bisa belajar atau mendapat berbagai informasi dari desa atau bahkan perkotaan lain di luar wilayahnya, sehingga apa yang sudah pernah berhasil di lakukan di wilayah lain bisa dicontoh dan diterapkan di daerahnya. Selain itu, berbagai ilmu pengetahuan bisa mudah diperoleh dari kemudahan akses informasi. Sangat jarang ditemukan sebuah masyarakat dengan akses informasi yang minim bisa berkembang dengan pesat. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki akses informasi yang mudah, maka perkembangannya akan cepat. Oleh karena itu akses informasi sangat penting untuk dimiliki sebuah masyarakat agar bisa berkembang dengan baik. Indikator perkembangan masyarakat ini bisa dilihat dari sarana dan prasarana akses informasi dan kemudahan akses informasi.

Indikator perkembangan masyarakat keempat dapat di lihat dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Contoh indikator yang bisa digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Masyarakat yang sudah maju cenderung memiliki SDM dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sedangkan masyarakat yang kurang maju memiliki penduduk yang belum mengetahui pentingnya pendidikan. Selain pendidikan, jenis pekerjaan masyarakat juga dapat digunakan untuk melihat kualitas SDM. Masyarakat yang maju cenderung memiliki SDM yang bekerja sebagai tenaga profesional dengan kualifikasi pendidikan maupun keterampilan/keahlian tertentu di berbagai bidang pekerjaan, begitu sebaliknya.

Indikator terakhir yang digunakan untuk melihat perkembangan masyarakat adalah pendapatan penduduk. Dalam indikator ini, masyarakat dikatakan sudah maju ketika pendapatan penduduknya sudah di atas rata-rata, dan sebuah masyarakat dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih di bawah rata-rata. Rata-rata yang dimaksud bisa berdasarkan UMR daerah setempat.

Penyusunan tipologi masyarakat ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun juga memiliki persamaan. Adapun daerah yang memiliki karakteristik yang sama, dimasukkan dalam kelompok tipologi yang sama. Masing-masing tipologi masyarakat memiliki beragam potensi dan permasalahan yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan (Gai, Witjaksono, & Maulida, 2020). Berdasarkan keragaman indikator fisik dan non-fisik dalam menentukan penggolongan masyarakat, serta mempertimbangkan perbedaan karakteristik, sehingga pengelompokan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa bagian dengan didasarkan pada lingkungan fisik yang sama, sosial budaya masyarakat, posisi geografis, kondisi spasial, dan administrasi atau tingkat perkembangan masyarakat. Pengelompokan ini bisa di sederhanakan menjadi tiga aspek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu aspek potensi dasar, aspek tipe desa/kelurahan, dan aspek tingkat perkembangan desa.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia (Toffler, 1970). Istilah “ekonomi kreatif” berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah (Purnomo, 2016).

Dalam sejarahnya, konsep ekonomi kreatif mulai ramai diperbincangkan sejak John Howkins, menulis buku dengan judul "*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*". Howkins (2001) mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Dalam arti esensi dari kreativitas adalah gagasan. Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi (Howkins, 2001).

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dibutuhkan berasal dari ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif, tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan

inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.

Studi lain menjelaskan bahwa ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Kreativitas tidak sebatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, namun juga bisa berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain kreativitas, inovasi dan penemuan (Purnomo, 2016).

a. Kreativitas (*Creativity*)

Kreativitas dapat dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, *fresh*, dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Hasil kreativitas bisa berupa ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (*thinking out of the box*). Seseorang yang memiliki kreativitas dan dapat memaksimalkan kemampuannya, akan mampu menciptakan atau menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.

b. Inovasi (*Innovation*)

Inovasi merupakan suatu transformasi ide/gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk atau pun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Sebagai contoh inovasi, cobalah melihat beberapa inovasi di video-video youtube.com dengan kata kunci "*lifehack*". Dalam video tersebut diperlihatkan bagaimana suatu produk yang sudah ada, kemudian diinovasikan dan menghasilkan sesuatu yang bernilai jual lebih tinggi dan lebih bermanfaat.

c. Penemuan (*Invention*)

Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis android dan iOS juga menjadi salah satu contoh penemuan berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Saat ini bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggi tercermin dari kompetensi individu-individu dalam menciptakan inovasi. Ekonomi kreatif yang di dalamnya terdapat industri-industri kreatif memiliki daya tawar yang tinggi dalam ekonomi berkelanjutan karena individu-individunya memiliki modal kreativitas (*creative capital*) yang mereka gunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi. Pelaku industri kreatif saat ini lebih banyak didominasi oleh generasi muda dan kadang bisnis atau industrinya bersifat nonformal. Hasil kreasi dari generasi muda sering kali sangat kreatif, sehingga menjadi potensi tersendiri bagi industri dan bisnis yang menguntungkan. Kondisi ini mengharuskan fasilitator/pelaku pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana kondusif agar memotivasi generasi muda dalam memulai bisnis dan memberi akses-akses finansial yang berpihak pada generasi muda (Hasanah, 2015).

Hasil studi terdahulu menemukan bahwa terdapat satu wilayah di Indonesia tepatnya di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang cukup sukses melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif melalui pembinaan UMKM. Kecamatan Panakkukang tersebut saat ini terkenal sebagai pusat kawasan ekonomi kreatif Kota Makassar dengan berbagai bentuk usaha kreatif masyarakat. Beberapa bentuk usaha ekonomi kreatif tersebut diantaranya adalah desain interior, pakaian, seni rupa, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, serta kuliner. Dengan berbagai usaha ekonomi kreatif tersebut, terbukti mampu mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Panakkukang (Hasan, 2018).

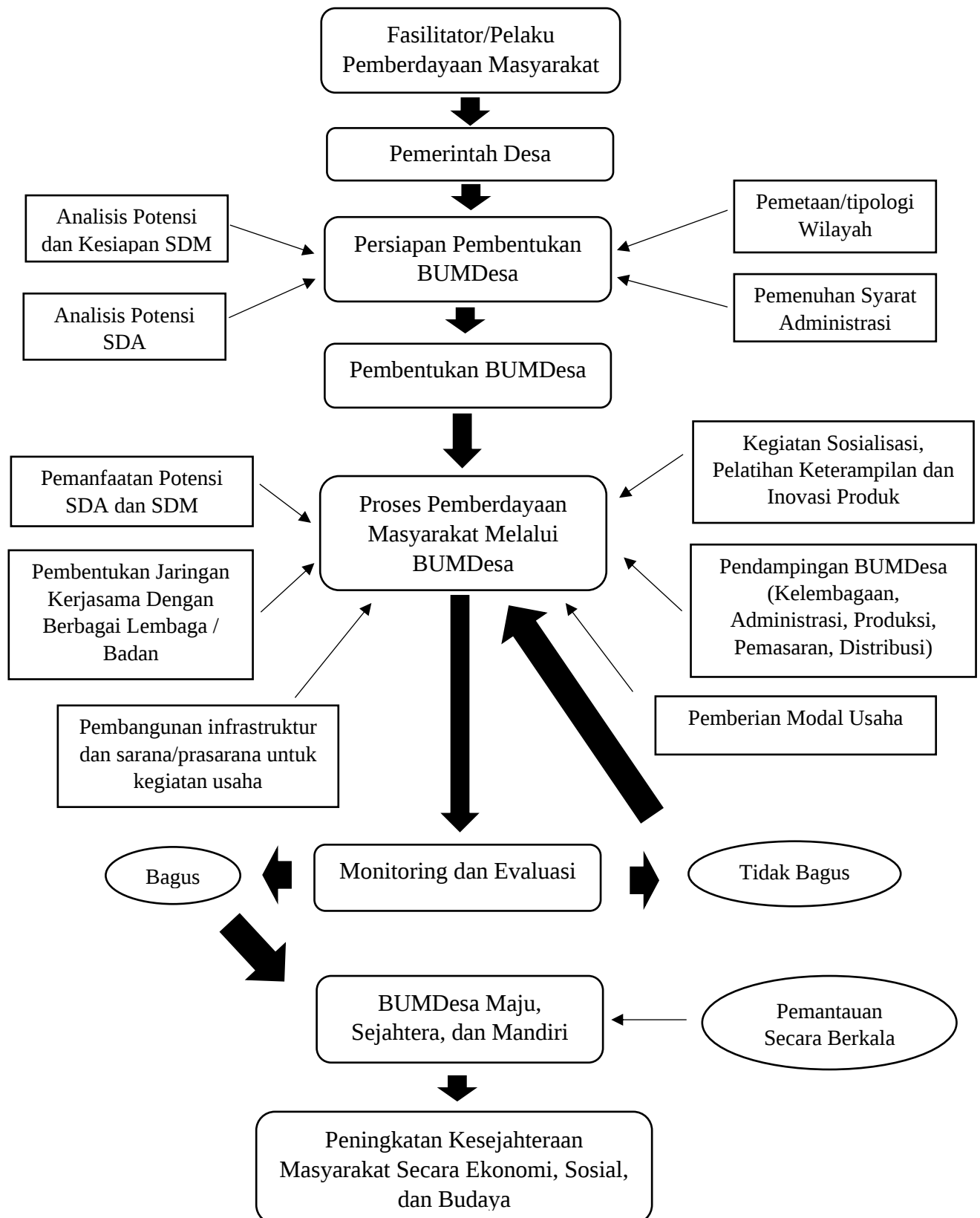
Salah satu pendukung berkembangnya ekonomi kreatif di suatu daerah adalah sektor pariwisata khususnya yang berbasis keunikan budaya lokal. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, keberadaan pariwisata setidaknya memberikan delapan keuntungan bagi masyarakat. Pertama, meningkatkan kesempatan untuk membuka usaha. Kedua, memperluas kesempatan kerja. Ketiga, meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah. Keempat, meningkatkan pendapatan nasional. Kelima, mempercepat proses pemerataan pendapatan. Keenam, meningkatkan nilai tambah produk hasil kebudayaan. Ketujuh, memperluas pasar produk dalam negeri, dan terakhir, memberikan dampak multiplier dalam perekonomian yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi wisatawan, investor, maupun para pedagang (Fatkhullah, 2021). Delapan keuntungan ini tentu saja sangat mendukung kemajuan ekonomi kreatif masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata.

Berdasarkan pemaparan konsep ekonomi kreatif yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu alternatif bidang usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan *creative capital* yang dimiliki, masyarakat dapat

mengembangkan model ide dan talenta yang bersumber dari masyarakat itu sendiri untuk dapat menciptakan suatu produk inovasi yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Pola pikir kreatif yang dimiliki oleh masyarakat ini, sebagai potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan prekonomian masyarakat.

Alur Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan BUM Desa

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dipaparkan, penulis mencoba memformulasikan alur dan karengka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pembentukan BUM Desa. Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Badan usaha milik desa atau yang sering disebut dengan istilah “BUM Desa” merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUM Desa, perlu upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah (misalkan Dinas PMD), BUMN, lembaga sosial/kemasyarakatan, maupun pihak swasta. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba mengusulkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa. Secara ringkas alur pemberdayaan masyarakat yang penulis usulkan dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2. Alur Pemberdayaan Masyarakat Melalui Permbentukan BUM Desa
(Penulis, 2021)

Berdasarkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa yang tersaji dalam gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi ini sangat penting dilakukan mengingat lokasi pembentukan BUM Desa berada di bawah naungan pemerintah desa secara langsung, dan ke depannya banyak kegiatan BUM Desa yang melibatkan peran serta pemerintah desa.

Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, dan sudah mendapat persetujuan serta dukungan dari pemerintah desa, tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan pembentukan BUM Desa. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan/tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa, kemudian melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUM Desa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUM Desa. Selanjutnya melihat potensi SDA untuk menentukan jenis/model usaha yang akan dikembangkan, dan terakhir melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam pembentukan BUM Desa. Setelah seluruh tahap persiapan dijalankan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUM Desa. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BUM Desa adalah sistem rekrutmen tenaga pengelola (SDM) yang harus mampu menjaring tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan memiliki komitmen kerja yang tinggi.

Adapun salah satu bidang usaha yang bisa dipilih untuk program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa adalah bidang ekonomi kreatif, seperti usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan sebagainya. Bidang ekonomi kreatif ini cocok dikembangkan untuk usaha BUM Desa yang umumnya dimulai dari usaha kecil atau menengah. Saat ini usaha di bidang ekonomi kreatif sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian tetap harus menyesuaikan dengan potensi SDM dan SDA yang dimiliki oleh masing-masing daerah berdasarkan hasil analisis tipologi masyarakat yang telah dilakukan.

Tahap selanjutnya setelah BUM Desa terbentuk secara resmi adalah proses pemberdayaan BUM Desa. Proses pemberdayaan ini sangat penting dilakukan agar BUM Desa yang sudah dibentuk benar-benar bisa berjalan/beroperasi sebagaimana mestinya. Dalam tahap pemberdayaan ini, cukup banyak kegiatan yang perlu dilakukan, seperti kegiatan sosialisasi/pelatihan/diklat bagi pengurus BUM Desa maupun bagi para *stakeholders*. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka transfer *knowledge* dan keterampilan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membantu menganalisis potensi SDA dan SDM yang dimiliki dan

membantu proses pemanfaatannya secara optimal. Setelah itu, membantu membangun jaringan dengan berbagai badan/lembaga untuk bekerja sama dalam rangka pengembangan BUM Desa.

Pihak fasilitator/pelaku pemberdayaan masyarakat selanjutnya membantu BUM Desa mendapatkan modal awal untuk kegiatan usaha, misalnya dari CSR perusahaan, dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten, dari pemerintah provinsi, maupun dari pemerintah pusat. Lalu pihak fasilitator juga membantu proses pembangunan atau pembelian infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional BUM Desa. Fasilitator juga melakukan pendampingan terhadap seluruh kegiatan BUM Desa pada masa awal berdiri, mulai dari kegiatan produksi, pemasaran, distribusi, pelengkapan administrasi (termasuk laporan keuangan).

Setelah pemberdayaan BUM Desa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Hasil monitoring dan evaluasi ini akan mengkategorikan BUM Desa sudah berhasil atau masih gagal. BUM Desa yang masih gagal, dilakukan pemberdayaan kembali setelah melalui tahap evaluasi untuk melihat penyebab kegagalannya. Sementara itu, BUM Desa yang sudah berhasil akan menjadi BUM Desa yang mandiri, sejahtera dan maju. BUM Desa yang sudah berhasil ini akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. BUM Desa yang sudah berhasil mandiri ini, tidak serta-merta dilepas, namun pihak fasilitator tetap melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan (*development*) yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia (di masa orde baru) dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Konsep “pembangunan” yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini, begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme *trickle down effect* (efek rambatan) yang terbukti tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *participatory* (partisipatif), *empowering* (memberdayakan), dan *sustainable*

(berkelanjutan). Adapun tujuan utama pemberdayaan masyarakat seringkali untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dua teori pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan dalam paper ini adalah teori ABCD (*asset based community development*) dan teori *stakeholders*. Teori ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori ABCD, tahap penting yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dengan cara melakukan studi tipologi masyarakat. Secara sederhana tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap daerah.

Menurut teori *stakeholders*, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, kemudian pihak swasta, akademisi, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Peranan para pemangku kepentingan tersebut, tentu saja tidak bisa dilakukan secara terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara kolektif dan saling bersinergi demi tercapainya tujuan bersama.

Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara konseptual ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Istilah “ekonomi kreatif” berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah.

Salah satu bentuk nyata pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan BUM Desa. BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola

oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUM Desa ini adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa ini dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi/peninjauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A Theory of Trickle-Down Growth and Development. *The Review of Economic Studies*, LXIV(2), 151–172. doi:<https://doi.org/10.2307/2971707>
- Alfitri. (2011). *Community Development, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alhamuddin, Aziz, H., Inten, D. N., & Mulyani, D. (2020). Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (ABCD) untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Madrasah di Era Industri 4.0. *International Journal of Community Service Learning*, IV(4), 321-331.
- Anharudin, Fernando, D., Saefudin, Susandi, D., & Dwiayatno, S. (2019). Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Keterampilan Membuat Nugget Berbahan Dasar Ikan Bandeng Sebagai Bahan Pangan Lokal. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, XIX(2), 141-149.
- Daulay, Z. A. (2018). Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dengan Metode Triple Helix (Studi Pada UMKM Kreatif di Kota Medan). *Tansiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, I(2), 1-22.
- Despica, R. (2018). Tipologi Desa Berdasarkan Perkembangan Nagari Aur Begalung Talaok Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Spasial*, III(5), 39-43.
- Fatkhullah, M. (2021). Agama, Takhayul dan Kearifan Lokal dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Berbasis Pariwisata. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(1), 35-46. Diambil kembali dari <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/arrehla/article/view/4202>
- Fithriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, I(2), 1–9.
- Fitria. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Adl Islamic Economic*, I(1), 13-28.
- Fitriawan, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement*, I(1), 47–58.
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa*. Malang: CV. Dream Litera Buana.



- Habib, M. A., & Mahyuddin. (2021). Evaluasi Pengelolaan Teknologi TPS 3R di Desa Wisata Religi Gunungpring Kabupaten Magelang. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, I(1), 1-34.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Harahap, I. S. (2018). Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, II(2), 101-115.
- Hasan, M. (2018). Pembinaan Ekonomi Kreatif dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi. *Jekpen: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, I(1), 81-86.
- Hasanah, L. L. (2015). Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*, IV(2), 268-280. doi:<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>
- Howkins, J. (2001). *Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin Global.
- Mardikanto, T. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, IV(2), 259-278.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Jurnal Nominal*, I(1), 24.
- Purnamasari, S. D., & Ma'ruf, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) (Studi BUM DESA Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk). *Publika*, VIII(5), 1-12.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Surakarta: Ziyad Visi Media.
- Puspitasari, D. N., Warsono, H., & DM, I. H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDesa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, II(1), 70-83.
- Rahman, N. E. (2018). Potret Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset Lokal pada Kelompok Budidaya Ikan Koi di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Situbondo. *Jurnal PKS*, VII(3), 208.
- Riyanti, C., & Raharjo, S. T. (2021). Asset Based Community Development dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, III(1), 115-126.

- Rosyidi, S. (2004). *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salman, D. (2012). *Manajemen Perencanaan berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi serta Peran Fasilitator*. Makassar: Sulawesi Capacity Development Project Kerjasama Kemendagri dan JICA. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, V., Saepuloh, L., & Eriswanto, E. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Karangjaya Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan V"*. VII, hal. 1-7. Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.
- Suardi, Mallongi, S., & Baharuddin, D. (2019). Model Pembangunan Pertanian Melalui Penerapan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kabupaten Pinrang dengan Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, II(4), 48-61.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, G. (2009). *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Toffler, A. (1970). *Future Shock*. New York: Random House.
- Usrah, C. R., Habib, M. A., & Fakhurrazi, F. (2021). Para Pemuda Ramuan Ajaib (Kontsruksi Kecantikan Anti Aging dalam Iklan Sk II R.N.A Power Airy Tang Wei's Secret to Look Younger-Looking Skin). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, I(1), 19-30. Diambil kembali dari <https://ojs.unimal.ac.id/dialektika/article/view/3801>
- Wahyu, Golar, & Massiri, S. D. (2019). Analisis Kepentingan Stakeholder dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi. *Jurnal Forestsains*, XVI(2), 105 - 116.
- Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, XII(1), 17.
- Wrihatnolo, R. R. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan*. Makassar: Desertasi Universitas Hasanuddin.